



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 56 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pelayanan, keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada bandar udara yang belum diusahakan komersial serta meningkatkan profesionalisme aparatur dan optimalisasi pemanfaatan dan pemenuhan jabatan fungsional yang berkembang di bidang Transportasi Udara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- b. bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/480/M.KT.01/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 39 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Nomor PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 688);
 - b. Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1489); dan
 - c. Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262),
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara berjumlah 158 (seratus lima puluh delapan) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama;
 - b. 12 (dua belas) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I;
 - c. 23 (dua puluh tiga) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II; dan
 - d. 121 (seratus dua puluh satu) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III.
- (2) Satpel BU berjumlah 18 (delapan belas).
- (3) Daftar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Satpel BU yang memuat nama bandara, lokasi, dan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 976

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHIDUDDIN HERPRIARSONO

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 56 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

DAFTAR KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Provinsi Aceh				
1.	Cut Nyak Dhien Nagan Raya	Nagan Raya	II	
2.	Maimun Saleh	Sabang	III	
3.	Lasikin	Sinabang	III	
4.	Teuku Cut Ali	Tapak Tuan	III	
5.	Rembele	Takengon	III	
	Blangkajeren	Gayo Lues	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Rembele
	Alas Leuser	Kutacane	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Rembele
6.	Malikussaleh	Aceh Utara	III	
Provinsi Sumatera Utara				
7.	Binaka	Gunung Sitoli	II	
8.	Lasondre	Pulau-pulau Batu	III	
9.	FL Tobing	Sibolga	III	Pinangsori (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Sibisa	Parapat	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU FL Tobing
10.	Aek Godang	Padang Sidempuan	III	
Provinsi Sumatera Barat				
11.	Rokot	Sipora	III	
Provinsi Kepulauan Riau				
12.	Dabo	Singkep	III	
13.	Letung	Anambas	III	
14.	Raja Haji Abdullah	Karimun	III	Sei Bati (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
15.	Ranai	Natuna	III	
Provinsi Riau				
16.	Japura	Rengat	III	
17.	Pasir Pangaraian	Pasir Pangaraian	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Provinsi Jambi				
18.	Depati Parbo	Kerinci	III	
19.	Muara Bungo	Rimbo Bujang	III	
Provinsi Bengkulu				
20.	Fatmawati Soekarno	Bengkulu	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
21.	Muko-muko	Muko-muko	III	
	Enggano	Enggano	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Muko-muko
22.	Silampari	Lubuk Linggau	III	
	Muhammad Taufik Kiemas	Pesisir Barat, Lampung	Satpel BU	Pekonserai (nama bandar udara lama berdasar PM 40/2014), Pelayanan Kantor UPBU Silampari
Provinsi Bangka Belitung				
23.	H. As. Hanandjoedin	Tanjung Pandan	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Provinsi Lampung				
24.	Radin Inten II	Lampung Selatan	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Provinsi Jawa Barat				
25.	Cakrabhuana	Cirebon	III	Penggung (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
Provinsi Jawa Tengah				
26.	Tunggul Wulung	Cilacap	III	
27.	Dewa Daru	Karimun Jawa	III	
Provinsi Jawa Timur				
28.	Trunojoyo	Sumenep	III	
29.	Harun Thoir	Gresik	III	Bawean (nama bandara lama berdasarkan PM 40 tahun 2004)
Provinsi Nusa Tenggara Barat				
30.	Sultan Muhammad Salahuddin	Bima	II	
31.	Sultan Muhammad Kaharuddin	Sumbawa	III	Brangbiji (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
Provinsi Nusa Tenggara Timur				
32.	Fransiskus Xaverius Seda	Maumere	II	Wai Oti (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
33.	Umbu Mehang Kunda	Waingapu	II	Mau Hau (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
34.	Komodo	Labuhan Bajo	II	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
35.	H. Hasan Aroeboesman	Ende	II	
36.	Frans Sales Lega	Ruteng	III	Satar Tacik (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
37.	Tambolaka	Waikabubak	II	
38.	A.A Bere Tallo	Atambua	III	Haliwen (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
39.	Mali	Alor	III	
	Kabir	Alor	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Mali
40.	Gewayantana	Larantuka	III	
41.	David Constantijn Saudale	Rote Ndao	III	Lekunik (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
42.	Tardamu	Sabu	III	
43.	Soa	Bajawa	III	
44.	Wonopito	Lewoleba	III	
Provinsi Kalimantan Barat				
45.	Rahadi Oesman	Ketapang	II	
46.	Tebelian	Sintang	II	Relokasi dari UPBU Susilo - Sintang
47.	Pangsuma	Putussibau	II	
48.	Nangapinoh	Nangapinoh	III	
Provinsi Kalimantan Tengah				
49.	Tjilik Riwut	Palangkaraya	I	
50.	Iskandar	Pangkalan Bun	II	
51.	H. Asan	Sampit	II	
52.	Sanggu	Buntok	III	
53.	Beringin	Muara Teweh	III	
54.	Kuala Pembuang	Kotawaringin Timur	III	
55.	Tumbang Samba	Tumbang Samba	III	
56.	Kuala Kurun	Kuala Kurun	III	
Provinsi Kalimantan Selatan				
57.	Gusti Syamsir Alam	Kotabaru	II	Stagen (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
Provinsi Kalimantan Timur				
58.	Aji Pangeran Tumenggung Pranoto	Samarinda	I	Relokasi dari UPBU Temindung - Samarinda
59.	Melak	Sendawar	III	
60.	Kalimarau	Tanjung Redep	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
61.	Maratua	Berau	III	
62.	Datah Dawai	Datah Dawai	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Provinsi Kalimantan Utara				
63.	Juwata	Tarakan	I Utama	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
64.	Seluwing	Malinau	III	
65.	Nunukan	Nunukan	III	
66.	Yuvai Semaring	Long Bawan	III	
67.	Tanjung Harapan	Tanjung Selor	III	
68.	Long Apung	Long Apung	III	
Provinsi Sulawesi Utara				
69.	Naha	Tahuna	III	
70.	Melongguane	Sangihe Talaud	III	
	Miansas	Kepulauan Talaud	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Melongguane
Provinsi Gorontalo				
71.	Djalaluddin	Gorontalo	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah				
72.	Mutiara Sis-Al Jufri	Palu	I	Mutiara (nama bandara sesuai KM 7/2008), Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
73.	Pogogul	Buol	III	
74.	Syukuran Aminudin Amir	Luwuk	II	Bubung (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
75.	Tanjung Api	Ampana	III	Tojo Una Una (nama bandar udara lama berdasarkan PM 8/2018)
76.	Sultan Bantilan	Tolo-toli	III	Lalos (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
77.	Kasiguncu	Poso	II	
78.	Morowali	Morowali	III	
Provinsi Sulawesi Barat				
79.	Tampa Padang	Mamuju	II	
	Sumarorong	Mamasa	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Tampa Padang
Provinsi Sulawesi Selatan				
80.	Pongtiku	Makale	III	
81.	H. Aroepala	Pulau Selayar	III	
82.	Andi Jemma	Masamba	III	
83.	Bone	Bone	III	
84.	Seko	Seko	III	
85.	Rampi	Rampi	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
86.	Lagaligo	Luwu	III	Bua (nama bandar udara lama berdasarkan PM 8 tahun 2018)
Provinsi Sulawesi Tenggara				
87.	Haluoleo	Kendari	I	Wolter Monginsidi (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
88.	Matahora	Wakatobi	III	
89.	Sangia Ni Bandera	Kolaka	III	
90.	Beto Ambari	Bau-bau	III	
91.	Sugimanuru	Muna	III	
Provinsi Maluku Utara				
92.	Sultan Babullah	Ternate	II	
	Gebe	Pulau Gebe	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Sultan Babullah
93.	Emalamo	Sanana	III	
94.	Buli	Maba	III	
95.	Kuabang	Kao	III	
96.	Gamar Malamo	Galela	III	
97.	Oesman Sadik	Labuha	III	
98.	Pitu	Morotai	III	
Provinsi Maluku				
99.	Karel Sadsuitubun	Langgur	II	Ibra (nama bandar udara lama berdasar PM 40/2014)
100.	John Becker	Pulau Kisar	III	
	Moa	Maluku Tenggara	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU John Becker
101.	Larat	Pulau Larat	III	
102.	Dobo	Pulau Aru	III	
103.	Mathilda Batlayeri	Maluku Tenggara Barat	III	Olilit (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
104.	Bandaneira	Pulau Banda	III	
	Kuffar	Seram Bagian Timur	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Bandaneira
105.	Namlea	Pulau Buru	III	
106.	Namrole	Pulau Buru	III	
107.	Amahai	Pulau Seram	III	
108.	Wahai	Pulau Seram	III	
Provinsi Papua				
109.	Sentani	Jayapura	I Utama	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
110.	Dabra	Mamberamo Raya	III	
111.	Mopah	Merauke	I	
	Senggo	Mappi	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Mopah
112.	Kamur	Asmat	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
113.	Kimam	Merauke	III	
114.	Bomakia	Boven Digoel	III	
115.	Senggeh	Keerom	III	
116.	Wamena	Jayawijaya	I	
117.	Elelim	Yalimo	III	
118.	Nabire	Nabire	II	Bandar Udara Nabire di Nabire
119.	Bilorai	Intan Jaya	III	
120.	Enarotali	Paniai	III	
121.	Waghete	Deiyai	III	
122.	Mararena	Sarmi	III	
123.	Tanah Merah	Boven Digoel	III	
	Manggalum	Boven Digoel	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Tanah Merah
	Korowai Batu	Boven Digoel	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Tanah Merah
124.	Mulia	Puncak Jaya	III	
125.	Sudjarwo Tjondronegoro	Serui	III	
126.	Oksibil	Pegunungan Bintang	III	
127.	Kiwirok	Pegunungan Bintang	III	
128.	Moanamani	Nabire	III	
129.	Mindiptanah	Boven Digoel	III	
130.	Kepi	Mappi	III	
131.	Kokonao	Mimika	III	
132.	Akimuga	Mimika	III	
133.	Mozes Kilangin	Mimika	II	
134.	Bokondini	Jayawijaya	III	
135.	Okaba	Merauke	III	
136.	Numfoor	Biak Numfoor	III	
137.	Illaga	Puncak	III	
	Sinak	Puncak Jaya	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Illaga
138.	Illu	Puncak Jaya	III	
139.	Tiom	Lanny Jaya	III	
140.	Ewer	Asmat	III	
141.	Batom	Pegunungan Bintang	III	
142.	Bade	Mappi	III	
143.	Karubaga	Tolikara	III	
144.	Nop Goliat Dekai	Yahukimo	II	
	Sobaham	Yahukimo	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Nop Goliat Dekai
Provinsi Papua Barat				
145.	Rendani	Manokwari	II	
146.	Domine Eduard Osok	Sorong	I	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
	Segun	Sorong	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Domine Eduard Osok
	Werur	Manokwari	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Domine Eduard Osok
147.	Marinda	Waisai	III	
148.	Torea	Fak-fak	III	
149.	Bintuni	Teluk Bintuni	III	
150.	Utarom	Kaimana	III	
151.	Merdey	Manokwari	III	Ijahabra (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
152.	Wasior	Teluk Womdana	III	
153.	Inanwatan	Sorong Selatan	III	
154.	Teminabuan	Sorong Selatan	III	
155.	Babo	Teluk Bintuni	III	
156.	Kambuaya	Manokwari	III	
157.	Kebar	Manokwari	III	
158.	Ayawasi	Sorong Selatan	III	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUNADJI HERPRIARSONO